

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk terbesar ke 4 di dunia, dimana dari banyaknya populasi yang dimiliki terdapat masalah kompleks salah satunya yaitu kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya terjadi pada negara-negara berkembang seperti Indonesia akan tetapi negara maju juga mengalami masalah kemiskinan, namun yang membedakan dari keduanya ialah tingginya kemiskinan yang terjadi di negara berkembang dibandingkan negara maju, hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan layaknya benang kusut masalah yang tidak memiliki ujung di setiap negara.

Terdapat penyebab-penyebab dari kemiskinan telah banyak dirumuskan, salah satunya dari Konferensi Dunia (*World Summit for Social Development*) pada tahun 1995 bulan Maret, memaparkan secara luas dan detail definisi kemiskinan, yang mana kemiskinan memiliki berbagai bentuk, yang di dalamnya termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kekurangan akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan

oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan sipil (Suyanto, 1995:7-8).

Secara sadar atau tidaknya, kemiskinan terjadi karena sifat individu itu sendiri yang tidak mau atau tidak mampu untuk bertanggung jawab, dan sampai kepada upaya terstruktur yang memang disengaja. Di dalam Al-Qur'an sendiri menjelaskan adanya larangan berperilaku menimbulkan kemiskinan yang ada pada

Surat Al-Muddassir ayat 42-44:

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ ﴿٤٢﴾

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾

وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾

Artinya:

"Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar? (42) Mereka menjawab, Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan shalat,(43) dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin,(44)."<sup>1</sup>

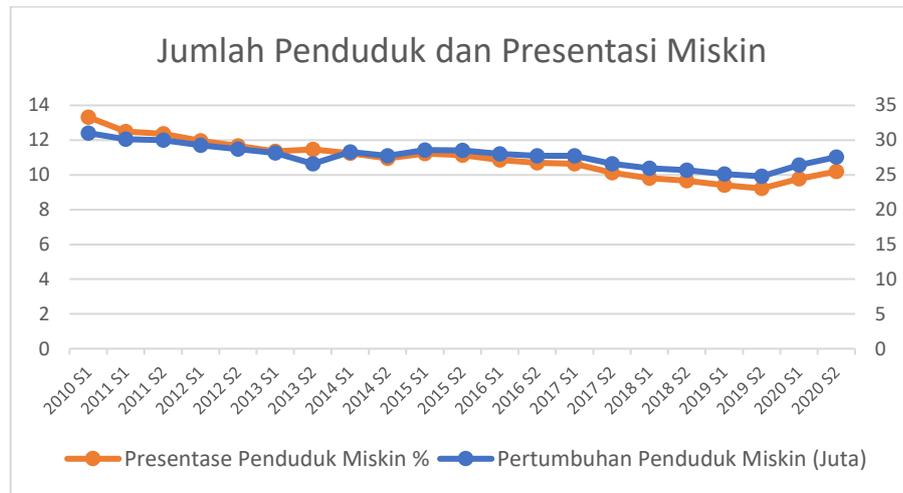
Ayat tersebut menjelaskan tentang tiap-tiap diri memiliki tanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya semasa hidup, kecuali golongan-golongan kanan merupakan orang-orang yang masuk surga, sedangkan golongan lain yang berdosa bergelimangan dalam azab neraka. Seringkali ketamakan dalam harta secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kemiskinan itu sendiri, orang-orang

---

<sup>1</sup> Muhammad. Abdula Ghoffar E.M , Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsiir (Bogor:Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h 339

yang kaya tidak memberikan hak-hak orang lain di dalam harta mereka, serta mereka tidak pernah memenuhi kewajibannya dan berbuat baik kepada makhluk-Nya dari sejenis (A. bin Muhammad, 2004). Dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan bagaimana munculnya orang miskin dan cara menghilangkan kemiskinan dengan cara menyedekahkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang miskin. Senada dengan Al-Qur'an, tujuan utama dari ekonomi secara jelas ingin menghilangkan kemiskinan, namun sisi yang difokuskan dari ekonomi ialah seperti yang diutarakan oleh (Ames et al., 2001:4-5) bahwasanya pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan, tetapi menghilangkan hal tersebut terlalu idealis sehingga yang dilakukan negara-negara maju lebih kepada menekan kemiskinan itu pada titik aman, tidak terkecuali Indonesia.

Menurut Muhammad Islam di (Rakhmatulloh, 2019) kurang lebih terdapat 51% penduduk di Indonesia yang masih hidup tidak layak jika dihitung dengan 6 indikator kemiskinan (Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan, Pangan, Air minum dan Perumahan). Namun pada data yang ada, kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terlihat pada data di bawah ini mulai dari 2010-2021,



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

**Gambar 1. 1**

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2010-Maret 2021

Faktanya yang disuguhkan oleh data yang ada ialah angka penduduk miskin mengalami stagnasi di tahun 2014-2017, namun sebaliknya di tahun setelahnya sampai 2019 mengalami penurunan sampai di angka 9,22 dan hal tersebut merupakan angka terendah kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2020 terdapat krisis global yaitu Covid-19, sehingga kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun 2020-2021 dan angkanya masih terus naik hingga saat ini, masalah kemiskinan menjadi masalah yang tidak pernah selesai dan menjadi topik yang menarik untuk diteliti untuk ditemukan kunci efektif dalam penanganannya. Faktanya dari data statistik yang dipaparkan oleh situs resmi pemerintah tersebut, kemiskinan mengalami penurunan setiap tahunnya yang rata-rata penurunannya 1,8%, namun pada kenyataannya penduduk miskin yang berada di lapangan jauh lebih banyak dibandingkan dengan data yang ada (Athapaththu & Kulathunga, 2018:98). Selaras

seperti yang dikatakan Muhammad Islan di (Rakhmatulloh, 2019), jika dihitung dengan indikator yang lebih rinci lagi masih banyak kemiskinan terjadi dan angkanya bisa mencapai 51%.

**Tabel 1. 1**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah di Indonesia

Tahun	Perkotaan	Pedesaan	Total
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</b>			
Maret 2020	1.13	2.21	1.61
Septembers 2020	1.26	2.39	1.75
Maret 2021	1.29	2.27	1.71
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)</b>			
Maret 2020	0.25	0.55	0.38
Septembers 2020	0.31	0.68	0.47
Maret 2021	0.31	0.57	0.42

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Terlihat dari data yang disuguhkan di atas, bahwasannya masih banyaknya kemiskinan yang terjadi sampai saat ini di kota maupun di pedesaan. Pada tabel di atas, indeks kedalaman kemiskinan masih diangka 1,13 pada tahun 2020 bulan Maret dan meningkat di bulan yang sama di tahun 2021. Sedangkan di pedesaan angkanya masih sekitar 2,21 pada tahun lalu dan di tahun 2021 meningkat menjadi 2,27. Pada indeks keparahan kemiskinan di kota angkanya meningkat dari sebelumnya 0,25 menjadi 0,31 di tahun 2021 terdapat 0,06 kenaikannya, hal yang sama terjadi di pedesaan angkanya naik 0,02 yang sebelumnya 0,55 menjadi 0,57 di tahun 2021. Secara total angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan, dimana angkanya sebesar 1,71 dan

0,42 yang sebelumnya di angka 1,61 dan 0,38. Terdapat banyak sumber dari jurnal-jurnal dan penelitian sebelumnya yang menyatakan masih tingginya angka kemiskinan di setiap daerah tak terkecuali di kota besar yang pertumbuhan ekonominya terhitung tinggi (Sasana & Kusuma, 2018:144)

Pemerintah Indonesia telah melakukan Otonomi Daerah kurang lebih dua dekade terakhir, namun sejauh ini setiap daerahnya belum bisa menekan maksimal angka kemiskinan dengan dana-dana seperti belanja daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) (David & Priyo, 2007:20). Sebaliknya yang dikatakan Keynesian, yang mana menurutnya, pengeluaran publik dapat meningkatkan pada sisi permintaan agregat yang mana memicu pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, penelitian sebelumnya membuktikan adanya hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah (Mehmood & Sadiq, 2010:33). Efek samping dari positifnya pertumbuhan ekonomi ialah terbukanya lapangan pekerjaan, dari sisi itulah pertumbuhan ekonomi bisa menekan atau mengurangi kemiskinan yang terjadi (Kirkpatrick, 2001:10)

Peran pemerintah dengan belanja daerahnya dan dana alokasinya sebagai bentuk penekanan kemiskinan, sejauh ini belum memenuhi tujuan utamanya. Pemerintah memberikan dana yang besar setiap tahunnya pada sektor-sektor yang dikatakan bisa menekan kemiskinan, namun efektivitas dari hasil belanja tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal (Omodero, 2019:96). Kenyataannya penambahan anggaran setiap tahunnya bukan saja karena objek sasaran anggaran, melainkan terdapat pengeluaran akibat tingkat inflasi yang membuat nilai uang rupiah sendiri terkikis sehingga membutuhkan nilai anggaran yang lebih banyak

dari sebelumnya karena biaya pembangunan juga akan meningkat dan mencapai batas anggaran penanggulangan kemiskinan. Disisi lain peningkatan berlebihan pada pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan defisit pada anggaran, namun jika dilakukan pengurangan menyebabkan tidak berjalannya program pembangunan dengan baik, hal tersebut menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah dalam menyusun anggaran yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang kompleks.

Banyak teori dan pakar mengatakan defisit fiskal merupakan awal mula penyakit ekonomi, karena defisit fiskal membuat menurunnya kesejahteraan dalam beberapa alasan; menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan mengesampingkan investasi swasta (Swasono & Martawardaya, 2016:144) Dampak defisit fiskal tidak hanya berhenti pada hal itu, namun menimbulkan efek lain dalam perekonomian, seperti inflasi yang tinggi, pertumbuhan yang rendah, *Crowding Out* dari investasi, dan konsumsi swasta dalam jangka panjang (Ammama et al., 2011). Pada akhirnya menyebabkan penurunan kesejahteraan dan meningkatkan kemiskinan dalam perekonomian itu sendiri.

Pembangunan ekonomi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Pembangunan sudah dilakukan dan akan terus dilakukan secara terpadu serta berkelanjutan sesuai dengan titik beratnya sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Salah satu standar berhasilnya sebuah pembangunan adalah menurunnya jumlah penduduk miskin, hal ini bukanlah mustahil namun butuh proses yang panjang. Menurut (Todaro, 1995:143), tujuan utama pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan

yang tinggi, disamping itu juga harus menurunkan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta tingkat pengangguran. Tidak bisa dihindari pula bahwa kemiskinan semacam sebuah virus yang buruk dampaknya dan sifatnya endemik, peran pemerintah dalam hal ini adalah menekan atau mengurangi penduduk miskin dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakatnya. Meski harus mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah juga harus memperhatikan kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya tinggi tapi berkualitas. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi sudah membuat Indonesia masuk dalam negara menengah ke atas oleh pihak *International Monetary Fund* dan *World Bank*, namun pada kenyataannya tingginya pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan kualitas yang bagus pula dari pertumbuhan itu. Hal ini dapat dilihat dari PDB per kapitanya yang masih terbilang rendah meski PDB umumnya tinggi. (Mahembe & Odhiambo, 2020:150)

Dana Alokasi Umum disingkat DAU merupakan dana yang dibentuk melalui Undang-Undang Otonomi Daerah, dana tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut APBN yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan setiap daerah untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dalam beberapa penelitian mengenai DAU, sejauh yang ditemukan peneliti dalam penelitian sebelumnya bahwa DAU memiliki hubungan yang negatif dan signifikan, namun kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan, yang mana pengaruh DAU hanya berkisar 3,9% dalam mengurangi kemiskinan, artinya DAU kurang memiliki dampak besar dalam mengurangi kemiskinan di daerah Tangerang (Imal, 2012:168). Pada penelitian lain

yang dilakukan (Basyir, 2015:60) DAU sendiri sejauh ini cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan, yang mana DAU menurunkan kemiskinan yang hubungannya negatif dan berpengaruh.

Sejalan dengan pernyataan (Halim, 2004:166) bahwa pemberian DAU telah disesuaikan kepada daerah dengan tingkat kemiskinan, jika daerah itu memiliki kemiskinan tinggi maka pemberian dana besar dan begitu sebaliknya. Hal tersebut dilakukan pemerintah bertujuan untuk menekan kemiskinan di daerah. Adanya belanja pemerintah memberikan dampak yang terbilang efektif dalam mengurangi kemiskinan terutama belanja tersebut diletakan pada sektor kunci seperti, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta perumahan dan fasilitas umum. Belanja-belanja tersebut termasuk belanja yang dikatakan cukup efektif untuk mengurangi kemiskinan secara langsung, menurut (Omodero, 2019:97)

Dari sekilas pemaparan diatas peneliti akan meneliti dari sisi belanja pemerintah pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan perumahan dan fasilitas umum, dana alokasi umum, populasi, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi-provinsi Indonesia menggunakan model data panel dinamis dalam pengujiannya pada variabel-variabel tersebut, dengan kemungkinan yang kuat untuk mengurangi kemiskinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Melanjutkan pandangan yang ada di latar belakang, peneliti berusaha menyelam lebih dalam permasalahan kemiskinan yang berada di Provinsi-provinsi di Indonesia, peneliti menarik garis permasalahan menjadi sebuah pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh belanja daerah (Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap kemiskinan pada provinsi-provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Populasi terhadap kemiskinan pada provinsi-provinsi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan pada provinsi-provinsi di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap kemiskinan pada provinsi-provinsi di Indonesia?
5. Apakah variabel-variabel tersebut secara bersamaan mampu menekan kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui seberapa pengaruhnya belanja daerah (Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Perumahan dan Fasilitas Umum) terhadap kemiskinan di Provinsi-provinsi Indonesia
2. Mengetahui seberapa pengaruhnya populasi terhadap kemiskinan di Provinsi-provinsi di Indonesia
3. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi-provinsi Indonesia
4. Mengetahui seberapa pengaruhnya dana alokasi umum terhadap kemiskinan di Provinsi-provinsi Indonesia
5. Menjelaskan variabel-variabel secara bersamaan dalam menekan kemiskinan di Provinsi-provinsi Indonesia

#### **D. Manfaat Penelitian**

Keluaran dari penelitian ini memberikan sudut pandang lain, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Sisi praktik, menghasilkan sebuah sudut pandang lain dari arah pengeluaran daerah sebagai solusi atau batu loncatan bagi pengentasan kemiskinan di provinsi Indonesia
2. Sisi teori, hasil yang diperoleh untuk mengembangkan bidang ilmu ekonomi dalam masalah kemiskinan dari sisi belanja daerah.